

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk sembako, subsidi, uang tunai, atau layanan umum lainnya yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Masyarakat yang menerima bantuan biasanya dalam data pemerintah telah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan utama dari bantuan sosial adalah mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat yang sedang mengalami masa sulit dalam hal ekonomi maupun sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial yang adalah bentuk pemberian bantuan yang bersifat secara tidak terus menerus diberikan dan sangat selektif untuk pemberian bantuan dalam bentuk tunai atau barang kepada masyarakat miskin yang memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Program bantuan sosial ini merupakan bentuk upaya pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin.

Menurut Kuncoro, (2017) dalam Igrisa et al., (2023) kemiskinan merupakan keadaan yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar menurut ekonomi yang dapat dilihat dari suatu daerah dapat dikatakan juga dengan kemiskinan. Kondisi tersebut dilihat berdasarkan pemasukan yang sangat rendah sehingga tidak cukup untuk membeli seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal yang tidak layak. Hal ini dapat berakibat pada standar hidup rata-rata yang tidak terpenuhi contohnya seperti pendidikan dan juga kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menekan kemiskinan merupakan masalah yang serius berkaitan erat dengan berbagai banyak faktor seperti pendidikan, pengangguran, pendapatan, karakter, geografis, dan budaya. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai aspek masalah ekonomi tetapi juga sebagai masalah yang melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai penghalang untuk mencapai potensi penuh baik secara individu

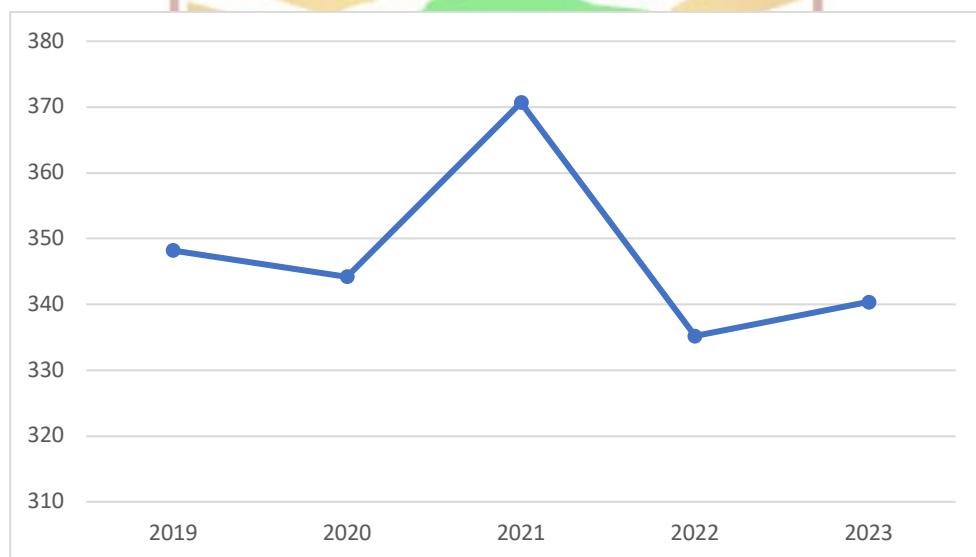
maupun kelompok dan kemiskinan tidak terhindarkan dari berbagai permasalahan kesehatan seperti masalah stunting.

Permasalahan kemiskinan ini sudah menjadi perhatian pada banyak daerah di Indonesia baik itu di provinsi, kabupaten dan kota. Dalam masalah ini pemerintah melakukan berbagai upaya melalui bantuan sosial. Pemerintah sudah banyak menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Adapun program pemerintah seperti bantuan tunai bersyarat dimana penerima bantuan harus memenuhi syarat tertentu, seperti anak wajib sekolah, ibu hamil yang wajib melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Bantuan tunai tanpa syarat penerima bantuan dana ini tidak memiliki kewajiban apapun dalam penerimaan bantuan ini, bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kelangsungan beban hidup dan memberi keleluasaan penerima dalam mengatur kebutuhan. Bantuan non-tunai sendiri diberikan pada masyarakat berupa barang seperti beras, minyak, gas, dan kupon makanan tujuan dari pemberian bantuan dalam bentuk non-tunai untuk mengurangi penyalahgunaan dana bantuan dan pemerintah mengarahkan bantuan ini untuk kebutuhan dasar.

Penerapan kebijakan sosial dijalankan melalui salah satu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pada rumah tangga miskin yang bertujuan untuk menekan kemiskinan dan serta meningkatkan kualitas hidup bagi penerima bantuan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfer (CCT)* atau sama dengan bantuan tunai yang bersyarat. Bagi keluarga yang menerima bantuan ini mereka diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dari penerima bantuan PKH dimana penerima wajib memberikan pendidikan kepada anaknya dan ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan serta balita dan anak-anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi.

Kemiskinan, Pendidikan, dan kesehatan yang merupakan faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain dalam kesejahteraan sosial, ketiga aspek ini memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Jika dari salah satu aspek mulai membaik maka aspek lainnya cenderung akan ikut

membaik. Hal ini dinyatakan dalam teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse, (1953) dalam Lindrianti, (2022). Faktor penyebab berdasarkan teori dalam lingkaran kemiskinan yaitu, pertama tidak meratanya kepemilikan terhadap sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang dimana penduduk miskin memiliki keterbatasan terhadap sumber daya. Kedua, kemiskinan juga diakibatkan karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya pada kualitas sumber daya manusia ini akan diakibatkan karena rendahnya pendidikan, diskriminasi, dan keturunan. Dikarenakan itu pemerintah sangat berusaha untuk meningkatkan pendidikan sebagai strategi utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan.



**Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)
Tahun 2019-2023**

Sumber: Data Diolah BPS 2024

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019-2020 mengalami sedikit penurunan yang menggambarkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Tahun 2019 penduduk miskin tercatat 348,22 ribu jiwa dan menurun pada tahun 2020 menjadi 344,23 ribu jiwa. Namun angka kemiskinan melonjak tinggi pada tahun 2021 menjadi 370,67 ribu jiwa akibat dari

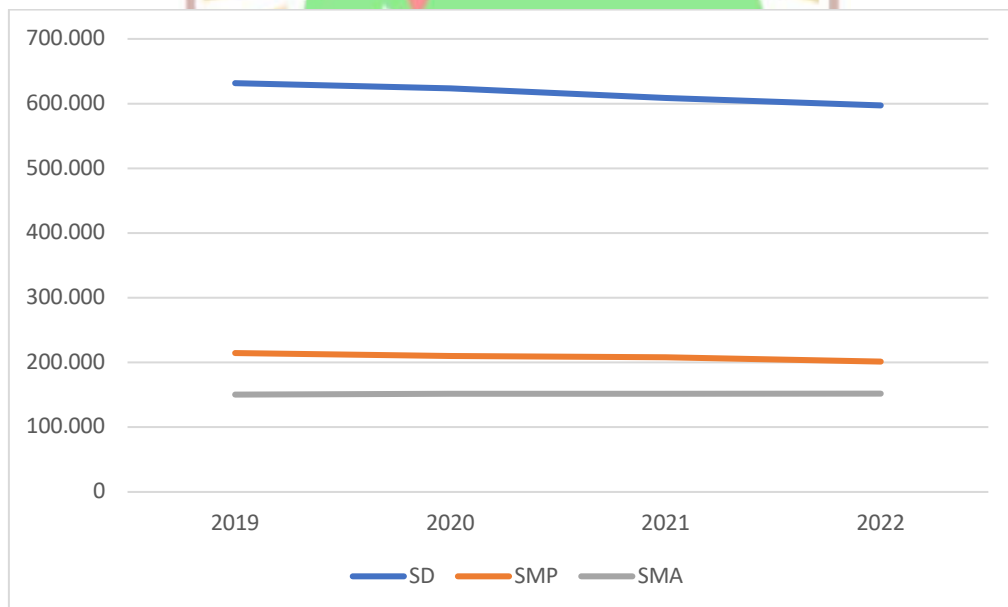
dampak pandemi yang menekan sektor informal, meningkatkan angka rentan terhadap sosial ekonomi, dan penurunan pendapatan. Pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan sampai pada 335,21 ribu jiwa dikarenakan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan dengan upaya pemerintah dengan pemberian bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan pangan lainnya. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sehingga terhitung ada 340,37 ribu jiwa dalam garis kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pemulihan ekonomi yang belum merata di Sumatera Barat.

Kemiskinan memberikan dampak negatif yang beragam mulai dari tingkat pendidikan menjadi rendah, kesehatan masyarakat menurun dikarenakan susah untuk mencapai akses kesehatan yang baik, pengangguran dan angka kriminalitas yang semakin tinggi. Jika akses terhadap pendidikan menjadi terbatas, hal ini akan menimbulkan lebih banyak masalah dalam jangka panjang karena negara tidak bisa mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seorang manusia. Negara yang dikatakan maju dinilai dari sumber daya manusia yang berkualitas dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan yang memiliki kualitas baik tentu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga sehingga dapat bersaing dengan baik.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terstruktur untuk menjadikan sebuah suasana yang pada proses belajar dan mengajar yang berpusat dalam keaktifan siswa dan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi kemandirian individu, spiritual, kontrol diri, mempunyai akhlak yang baik serta memiliki sifat terampil bagi individu, lingkungan sosial, bangsa dan negara. Potensi pada diri peserta didik akan dikembangkan melalui pendidikan dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan terampil. Ki Hajar Dewantara (Yanuarti, 2017) telah menjelaskan “Pendidikan diartikan sebagai hal yang penting dalam pertumbuhan anak-anak, menyampaikan ilmu pada pendidikan anak agar dapat

dimanfaatkan dan menjadi masyarakat yang dapat mencapai keselamatan diri dan kebahagiaan setinggi tingginya”.

Pendidikan formal merupakan investasi bagi modal manusia guna membantu individu dalam memperoleh pengetahuan serta keterampilan untuk meningkatkan produktivitas kerja (Adri & Harli, 2022) dan meningkatkan upah atau gaji yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun dalam meningkatkan akses pendidikan oleh rumah tangga bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena hal ini erat kaitannya dengan kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah mengupayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memotivasi orang tua agar mendaftarkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan mendorong mereka agar memenuhi syarat kehadiran dalam proses belajar dalam kelas minimal 85% dari hari efektif yang ada di sekolah dalam sebulan dan selama tahun ajaran berlangsung.



Gambar 1. 2 Jumlah Murid Di Sumatera Barat Tahun 2019-2022

Sumber: Data Diolah BPS, 2023

Gambar 1.2 menjelaskan jumlah siswa di Sumatera Barat pada setiap tingkatan pendidikan wajib. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) data memperlihatkan jumlah siswa sekolah pada tingkat SD terus berkurang untuk melanjutkan ke tingkat

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penurunan ini juga dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, demografi dan migrasi. Berbeda dengan tren SD dan SMP jumlah siswa pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) relatif stabil. Hal ini dapat dihubungkan dengan pemberian bantuan sosial PKH yang dimana penerima PKH diwajibkan untuk bersekolah. Dengan adanya insentif ini, keluarga penerima manfaat lebih terdorong untuk memastikan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan hingga SMA.

Meskipun pentingnya pendidikan bagi setiap manusia sudah jelas, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Salah satu tantangan yang dihadapi tingginya biaya pendidikan yang diperlukan untuk mencapai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hal ini bisa menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Banyak dari orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan karena terhambat kebutuhan pendidikan lainnya. Meskipun pada pendidikan dasar sekolah negeri gratis tetapi masih banyak kebutuhan pendidikan lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua.

Maka dengan hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan upaya bantuan pada bidang pendidikan akan menghasilkan peluang lebih besar bagi anak dalam mencapai pendidikan. Ini mungkin terjadi karena bantuan PKH ditujukan untuk anak yang berada di keluarga kurang mampu akan lebih mudah dalam mencapai akses pendidikan. (Seksi Informasi Hukum, 2023) menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat tiga tahap yang direncanakan untuk pencairan dana PKH yang dijadwalkan tahap 1 pada bulan Januari sampai Maret, tahap 2 dilaksanakan bulan April sampai bulan Juni, tahap 3 dari bulan Juli sampai bulan September, dan tahap ke 4 dilaksanakan bulan Oktober sampai bulan Desember. Nominal bantuan yang akan diterima oleh penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pendidikan, yaitu:

1. Penyandang disabilitas Rp600.000 setiap tahap pemberian bantuan
2. Anak sekolah SD Rp225.000 setiap tahap pemberian bantuan
3. Anak sekolah SMP Rp375.000 setiap tahap pemberian bantuan

4. Anak sekolah SMA Rp500.000 setiap tahap pemberian bantuan.

**Tabel 1. 1 Data Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
Di Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KPM Dana Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Sumatera Barat
1	Kepulauan Mentawai	6.311
2	Pesisir Selatan	19.829
3	Kab. Solok	16.318
4	Sijunjung	9.545
5	Tanah Datar	15.049
6	Padang Pariaman	18.955
7	Agam	20.873
8	Lima Puluh Kota	22.708
9	Pasaman	15.012
10	Solok Selatan	6.177
11	Dharmasraya	6.940
12	Pasaman Barat	17.771
13	Padang	22.740
14	Kota Solok	2.111
15	Sawahlunto	1.666
16	Padang Panjang	1.096
17	Bukittinggi	2.255
18	Payakumbuh	3.743
19	Pariaman	3.188
20	Sumatera Barat	212.287

Sumber: Dinas Sosial Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 yang bersumber dari dinas sosial Sumatera Barat tahun 2023 menjelaskan bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 212,287 penerima yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki variasi jumlah penerima bantuan PKH. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah rumah tangga miskin di masing-masing daerah menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk usaha pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan sekaligus usaha untuk memotong rantai kemiskinan. Target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga yang termasuk dalam kategori sangat miskin atau kelompok masyarakat yang berada di kluster 1 (satu). Pada tahun 2012, masyarakat calon penerima PKH merupakan rumah tangga atau keluarga dengan peringkat kesejahteraan 7% terendah yang merujuk pada rumah tangga yang berada paling rendah dalam perhitungan kesejahteraan (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015).

Dari pemaparan diatas, penelitian ini yang bertujuan menganalisis dampak program bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat apakah pemberian dana bantuan ini dapat memudahkan penerima dalam mencapai akses pendidikan dengan mudah. Dan bagaimana dari dana ini dapat meningkatkan taraf kehidupan bagi penerima bantuan. Meskipun sudah ada penelitian terkait dampak PKH terhadap pendidikan, namun masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara khusus menyoroti Sumatera Barat tahun 2023 dengan menggunakan faktor rumah tangga sebagai kovariat. Sehingga penelitian ini mengangkat judul "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pendidikan: Studi Kasus Sumatera Barat Tahun 2023".

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan penelitian ini bertujuan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap status sekolah anak di Sumatera Barat tahun 2023?
2. Bagaimana peran sumber penerangan rumah tangga dapat berdampak status sekolah anak?
3. Bagaimana luas lantai bangunan rumah tangga dapat berdampak terhadap status sekolah anak?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap status sekolah anak di Sumatera Barat tahun 2023.
2. Mengetahui bagaimana dampak sumber penerangan rumah tangga terhadap status sekolah anak.
3. Mengetahui bagaimana dampak luas lantai bangunan rumah tangga terhadap status sekolah anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur dan penelitian teoritis terkait dampak pengaruh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap status sekolah anak.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi acuan ilmiah yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang tertarik mengkaji

topik kajian yang serupa. Selain itu juga diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, terutama dalam proses evaluasi kebijakan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap status sekolah anak di Sumatera Barat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai variabel independen dan status sekolah anak sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023.

